PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) PADA BANK RAKYAT INDONESIA (BRI) CABANG KOTABUMI

Skripsi

Oleh:

MUHAMMAD THARIQ FADHILA
NPM 2012011101

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024

ABSTRAK

PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) PADA BANK RAKYAT INDONESIA (BRI) CABANG KOTABUMI

Oleh:

MUHAMMAD THARIQ FADHILA

Kredit merupakan sumber modal bagi pelaku ekonomi, dan penyaluran kredit dilakukan melalui perjanjian pinjam-meminjam yang diatur dalam Pasal 1754 KUHPerdata. Mengacu pada pasal 1754 KUHPdt bahwa dalam perjanjian pinjam meminjam ada kewajiban bagi peminjam untuk menggembalikan barang atau jumlah yang sama, BRI berperan sebagai salah satu bank yang menyalurkan KUR dengan tingkat suku bunga yang relatif rendah. Dengan rendahnya tingkat suku bunga KUR yaitu 6% pertahun, Debitur banyak mengajukan kredit ini, namun disinyalir para debitur tidak melakukan kewajibannya (gagal bayar).

Jenis penelitian ini adalah studi hukum normatif empiris dengan tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan ialah *non-judicial case study.* Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi pustaka. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan mendeskripsikan bahwa dalam pelaksanaan hak dan kewajiban perjanjian Kredit Usaha Rakyat di BRI Cabang Kotabumi, Surat Pengakuan Hutang memegang peranan penting sebagai dokumen yang mengatur hubungan antara debitur dan kreditur. Pelaksanaan hak dan kewajiban nasabah KUR BRI Cabang Kotabumi tidak seluruhnya dapat terimplementasikan dengan baik dikarenakan terdapat sejumlah hambatan. Hambatan-hambatan yang dihadapi adalah ketidakstabilan finansial yang dialami oleh nasabah, akibat fluktuasi pasar, perubahan regulasi, dan kenaikan biaya produksi. Hal ini menyebabkan penurunan pendapatan dan kesulitan dalam mengelola arus kas, yang pada gilirannya menghambat kemampuan mereka untuk melunasi pinjaman dengan tepat waktu atau bahkan menyebabkan wanprestasi.

Kata kunci: BRI Kotabumi, Hak dan kewajiban, Kredit Usaha Rakyat.

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF PEOPLE'S BUSINESS CREDIT (KUR) PROVIDING AT BANK PEOPLE INDONESIA (BRI) KOTABUMI BRANCH

By:

MUHAMMAD THARIQ FADHILA

Credit is a source of capital for economic actors, and credit distribution is carried out through loan and borrowing agreements regulated in Article 1754 of the Civil Code. Referring to article 1754 of the Criminal Code that in a loan agreement there is an obligation for the borrower to return goods or the same amount, BRI acts as one of the banks that distributes KUR at relatively low interest rates. With the low KUR interest rate, namely 6% per year, many debtors apply for this credit, but it is suspected that the debtors are not carrying out their obligations (failing to pay).

This type of research is an empirical normative legal study with the type of research used is descriptive legal research. The problem approach used is non-judicial case study. The data used in this research are primary data and secondary data and tertiary legal materials. Data collection was carried out by interviews and literature study. The data collected was then analyzed qualitatively.

The results of the research and discussion describe that in implementing the rights and obligations of the People's Business Credit agreement at BRI Kotabumi Branch, the Debt Acknowledgment Letter plays an important role as a document that regulates the relationship between debtors and creditors. The implementation of the rights and obligations of KUR BRI Kotabumi Branch customers cannot be fully implemented properly due to a number of obstacles. The obstacles faced are financial instability experienced by customers, due to market fluctuations, changes in regulations, and increases in production costs. This leads to reduced income and difficulty in managing cash flow, which in turn hinders their ability to repay loans on time or even leads to default.

Keywords: BRI Kotabumi, Rights and Obligations, People's Business Credit.

PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) PADA BANK RAKYAT INDONESIA (BRI) CABANG KOTABUMI

Oleh

MUHAMMAD THARIQ FADHILA
NPM 2012011101

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024

Judul Skripsi	:**PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) PADA BANK RAKYAT INDONESIA (BRI) CABANG KOTABUMI**
Nama Mahasiswa	: *Muhammad Thariq Fadhila*
Nomor Pokok Mahasiswa	: **2012011101**
Bagian	: **Hukum Perdata**
Fakultas	: **Hukum**

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Kingkin Wahyuningdiah, S.H., M.Hum.
NIP 195906261986032004

Dita Febrianto, S.H., M.Hum.
NIP 198401302008121004

2. Ketua Bagian Hukum Perdata

Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.
NIP 197404132005011001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Kingkin Wahyuningdiah, S.H., M.Hum.** .....

Sekretaris/Anggota : **Dita Febrianto, S.H., M.Hum.** .....

Penguji
Bukan Pembimbing : **Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.** .....

2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S.
NIP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **28 Juni 2024**

vii

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa	: MUHAMMAD THARIQ FADHILA
Nomor Pokok Mahasiswa	: 2012011101
Bagian	: Hukum Perdata
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) PADA BANK RAKYAT INDONESIA (BRI) CABANG KOTABUMI**" adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2020.

Bandar Lampung, 28 Juni 2024



Muhammad Thariq Fadhila
NPM 2012011101

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Muhammad Thariq Fadhila, dilahirkan di Kotabumi pada tanggal 15 Desember 2002, merupakan anak pertama dari dua bersaudara kandung, buah hati dari pasangan Bapak Ahmad Subekti dan Ibu Rusiyana.

Penulis mengawali pendidikan di Taman Kanak-Kanak (TK) Departemen Agama Kotabumi pada tahun 2007 dan menyelesaikan pada tahun 2008. Selanjutnya melanjutkan ke Sekolah Dasar Negeri (SDN) 5 Kelapa Tujuh Kotabumi hingga tahun 2014, lalu melanjutkan pendidikan jenjang menengah pertama di Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Insan Robbani Kotabumi hingga tahun 2017, dan melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Bandar Lampung hingga tahun 2020. Pada tahun 2020 terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, Program Pendidikan Strata (S1) dan mengikuti kegiatan di bidang akademik seperti mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Semarang Jaya, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2023.

Penulis aktif mengikuti organisasi ditingkat Fakultas Hukum dan Universitas Lampung. Ditingkat Fakultas Hukum, organisasi yang diikuti adalah Himpunan Mahasiswa Perdata (HIMA Perdata) sebagai Kepala Bidang Kajian dan Aksi Strategis (KASTRAT). Ditingkat Universitas, organisasi yang diikuti adalah Koperasi Mahasiswa Universitas Lampung (KOPMA Unila) pada tahun 2020 hingga tahun 2022

MOTO

“Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepada-Nya. Sungguh, Dia Maha Penerima tobat.**”**

(Q.S. An-Nasr : 3)

“Jika Allah bersamamu, maka jangan takut kepada siapa saja, akan tetapi jika Allah sudah tidak lagi bersamamu, maka siapa lagi yang bisa diharapkan?”

(Hasan Al Banna)

PERSEMBAHAN



Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, rezeki, serta kesabaran dan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi sumber inspirasi dalam segala tindakan dan langkah hidupku, sehingga penulis dapat belajar dan bekerja keras untuk menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada:

Ayahku Ahmad Subekti dan Ibuku Rusiyana.
Orang tua yang selama ini telah mendidik dengan penuh kasih sayang, melindungiku dan merawatku dengan setulus hati serta memberiku motivasi dan doa luar biasa untuk menjadi anak yang dapat mewujudkan impian dan membanggakan orang tua dalam kondisi sesulit apapun.

Adikku Nasywa Talitha Jasmine yang selalu menemaniku dan membantuku.
Terima kasih untuk dukungan yang selalu diberikan tiada hentinya untuk kakak selama ini.

Terima kasih atas doa, dukungan dan bantuan yang diberikan kepada penulis untuk mencapai keberhasilan.

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan ridho-Nya serta berkat doa dan restu dari kedua orang tua tercinta sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: "**PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) PADA BANK RAKYAT INDONESIA (BRI) CABANG KOTABUMI**" sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung dibawah bimbingan dari dosen pembimbing serta atas bantuan dari pihak lainnya.

Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Baginda Rasulullah, Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya yang Syafaatnya kita nantikan di akhirat kelak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih setulusnya kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini antara lain:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak M.Wendy Trijaya, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung
4. Ibu Kingkin Wahyuningdiah, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak mencurahkan segenap waktu dan pikirannya untuk membimbing, memberikan banyak masukan, saran, dan motivasi dalam proses penyelesaian skripsi ini. Semoga Bapak selalu diberikan kemudahan, kesehatan, dan kelancaran dalam segala hal, Aamiin.

5. Bapak Dita Febrianto, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak mencurahkan segenap waktu dan pikirannya untuk membimbing, memberikan banyak masukan, saran, dan motivasi dalam proses penyelesaian skripsi ini. Semoga Bapak selalu diberikan kemudahan, kesehatan, dan kelancaran dalam segala hal, Aamiin.
6. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum**.** selaku Pembahas I yang telah banyak membantu dan memberi kritik, saran, serta masukan yang sangat membangun dalam proses penyelesaian skripsi ini. Semoga Bapak selalu diberikan kemudahan, kesehatan, dan kelancaran dalam segala hal, Aamiin
7. Ibu Yulia Kusuma Wardani, S.H.,LL.M. .selaku Pembahas II yang telah banyak membantu dan memberi kritik, saran, serta masukan yang sangat membangun dalam proses penyelesaian skripsi ini. Semoga Ibu selalu diberikan kemudahan, kesehatan, dan kelancaran dalam segala hal, Aamiin
8. Prof. Dr. Nunung Rodliyah,M.A., selaku Pembimbing Akademik yangtelah memberikan bimbingan, motivasi, serta arahan selama Penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
9. Seluruh Dosen dan Karyawan/I Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi secara teknis maupun administratif.
10. Ibu Woro Hastuti selaku *Accounting Officer* KUR Bank BRI Cabang Kotabumi, Ibu Bella Listiantika Selaku *Surveyor* KUR Bank BRI Cabang Kotabumi Kabupaten Lampung Utara, dan para nasabah yang ikut andil dalam penelitian ini yang telah meluangkan waktu untuk membantudan memberikan segenap informasi demi kelancaran penyelesaian skripsi ini.
11. Sahabat yang menemaniku sejak tahun 2020, Maura Rahmatusyifa Adzani. Terima kasih banyak telah selalu menemaniku, semoga kebaikan dan kebahagiaan selalu menyertai.
12. Untuk seluruh teman-teman semasa perkuliahanku yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, serta teman seperbimbinganku, terima kasih atas semua kebersamaan semasa perkuliahan dan dalam momen selama menulis skripsi ini.
13. Almamater tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung.

14. Untuk siapapun orang-orang yang telah menyemangati dalam perjalanan skripsi ini.

Akhir kata, penulis meminta maaf atas segala kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam penulisan skripsi ini, karena penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan maka dari itu penulis sangat mengarapkan kritik, saran, dan masukan agar skripsi ini dapat lebih baik. Sedikit harapan penulis, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pihak.

Bandar Lampung, 28 Juni 2024
Penulis,

Muhammad Thariq Fadhila

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK ..... **ii**
ABSTRACT ..... **iii**
MENGESAHKAN ..... **vi**
PERNYATAAN ..... **vii**
RIWAYAT HIDUP ..... **viii**
MOTO ..... **ix**
PERSEMBAHAN ..... **x**
SANWACANA ..... **xi**
DAFTAR ISI ..... **xiv**
I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Rumusan Masalah 5
1.3. Ruang Lingkup Penelitian 6
1.4. Tujuan Penelitian 6
1.5. Kegunaan Penelitian 6
II. TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Perjanjian dan Perjanjian Kredit Bank 8
2.1.1. Perjanjian pada umumnya 8
2.1.2. Asas-Asas Perjanjian 9
2.1.3. Syarat Sah Perjanjian 11
2.2. Perjanjian Pinjam Meminjam 12
2.3. Perjanjian Kredit Bank 14
2.3.1. Unsur-Unsur Perjanjian Kredit Bank 14
2.3.2. Prinsip-Prinsip Dalam Pemberian Kredit Bank 15
2.3.3. Isi dan Pelaksanaan Perjanjian Bank 17
2.4. Bank dan Kredit Usaha Rakyat 18

2.4.1.Bank Pelaksana Kredit Usaha Rakyat (KUR) 18
2.4.2.Jenis-Jenis Lembaga Bank.....20
2.4.3.Pengertian Kredit Usaha Rakyat (KUR).....21
2.4.4.Dasar Hukum Kredit Usaha Rakyat 23
2.5.Tinjauan tentang Jaminan Kredit.....24
2.5.1.Pengertian Jaminan Kredit.....24
2.5.2.Fungsi Jaminan Kredit.....24
2.6.Kerangka Pikir.....26
III. METODE PENELITIAN
3.1.Jenis Penelitian 28
3.2.Tipe Penelitian.....29
3.3.Pendekatan Masalah 30
3.4.Data dan Sumber data.....30
3.4.1.Data Primer.....30
3.4.2.Data Sekunder.....31
3.5.Metode Pengumpulan Data.....32
3.5.1.Studi Kepustakaan 32
3.5.2.Wawancara (*Interview*).....32
3.6.Metode Pengolahan Data.....33
3.7.Analisis Data.....33
IV.HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1.Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Kredit Usaha Rakyat BRI Cabang Kotabumi. 34
4.1.1 Hak dan Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Kotabumi. 34
4.1.2.Kewajiban dan Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Kotabumi. 40
4.2.Hambatan Dan Penyelesaian Sengketa Dari Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Kotabumi 47
4.2.1.Hambatan Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Kotabumi 47
4.2.2.Penyelesaiaan Sengketa Dari Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Kotabumi.....53
V. PENUTUP
5.1.Kesimpulan.....59
5.2.Saran 60
DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang berperan besar dalam mengembangkan perkonomian. Peran bank sangat penting karena untuk melakukan kegiatan perekonomian di kehidupan sehari-hari. Lembaga perbankan kemudian menjadi sebuah kebutuhan vital dalam perekonomian. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah: "Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak". Ketergantungan tehadap perbankan dikarenakan perbankan merupakan lembaga yang berurusan dengan ketersedian modal bagi pelaku ekonomi.[1]

Bank berfungsi sebagai lembaga intermediasi (*financial intermediary)*, yaitu perantara penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat serta memberikan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran. Bank juga bertindak sebagai perantara atau penghubung antara nasabah yang satu dan yang lainnya jika keduanya melakukan transaksi.[2] Salah satu fungsi bank dalam penyaluran dana kepada masyarakat adalah pemberian kredit.

Istilah Kredit terdapat pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang diundangkan pada Lembaran Negara No.31 tahun 1992, diterbitkan di Jakarta pada

---

[1] Yuliadi, I. *Ekonomi Islam Filosofi, Teori dan Implementasi*. (Yogyakarta:LPPI-UMY). 2007. hlm.20

[2] Lukman Santoso AZ. *Hak dan Kewajiban Nasabah Bank*.(Yogyakarta: Pustaka Yustisia) 2011. hlm. 41

tanggal 10 November 1998 dalam penelitian ini disingkat dengan UUPB. Berdasarkan pada Pasal 1 angka 11 UUPB berbunyi "Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga."

Kredit adalah suatu fasilitas keuangan yang memungkinkan seseorang atau badan usaha untuk meminjam dana untuk membeli produk dan membayarnya kembali dalam jangka waktu yang ditentukan. Pemberian kredit merupakan kegiatan utama bank dan perusahaan pembiayaan (*multifinance*) yang mengandung risiko yang dapat berpengaruh pada kesehatan dan kelangsungan bank.[3] Kredit yang diberikan oleh bank dapat didefinisikan sebagai penyediaan dana yang berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan.[4]

Mengenai perjanjian kredit perbankan belum ada pengaturannya secara khusus namun mengenai perjanjian kredit menurut Hukum Perdata Indonesia merupakan salah satu dari bentuk perjanjian pinjam-meminjam yang diatur didalam buku ketiga KUHPerdata sehingga pada pelaksanaannya diserahkan pada kehendak para pihak yang mengikatkan diri.[5] Dalam mengikatkan diri debitur lebih diarahkan oleh bank, sebagai pihak kreditur untuk menyesuaikan dengan fasilitas-fasilitas kredit yang diberikan oleh bank tersebut. Setiap perjanjian kredit yang telah disepakati dan disetujui antara pihak kreditur dan pihak debitur wajib dituangkan didalam perjanjian kredit (akad kredit) secara tertulis.[6]

Perjanjian kredit menurut Hukum Perdata Indonesia merupakan suatu perjanjian pinjam meminjam yang diatur didalam Pasal 1754 KUHPerdata. Menurut Pasal

---

[3] Taswan. *Akuntansi perbankan: Transaksi dalam valuta rupiah: Edisi ketiga.*(Yogyakarta : Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN). 2008. hlm 67

[4]Yohanes Benny Apriyanto. "Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Bank Dki Jakarta Cabang Solo Melalui Jalur Non, Litigasi",(Yogyakarta: Jurnal Hukum Ekonomi dan Bisnis, Universitas Atma Jaya). 2015. hlm. 6.

[5]H. Budi Untung. *Kredit Perbankan di Indonesia.* (Yogyakarta: Andi offset). 2000. hlm 31.

[6]Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia.* (Bandung:Citra Aditya Bakti). 2000. hlm 338.

1754 KUHPerdata berbunyi “Pinjam pakai habis adalah suatu perjanjian, yang menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah barang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua itu akan mengembalikan barang sejenis kepada pihak pertama dalam jumlah dan keadaan yang sama.”[7] Adanya perjanjian bertujuan agar para pihak yang ada dalam perjanjian yaitu pihak bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur mengetahui hak dan kewajiban masing-masing. Hak dan kewajiban debitur menerima sejumlah uang pinjaman dan berkewajiban mengembalikan seluruh pinjaman kredit, sedangkan hak dan kewajiban bank (kreditur) adalah bank berhak menerima pengembalian atas pinjaman debitur dan berkewajiban menyalurkan dana pinjaman kepada debitur.[8]

Isi dari perjanjian itu sendiri adalah berupa hubungan hukum yang timbul dari adanya perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang pelaksanaannya diatur pada Pasal 1339 KUHPerdata yang berbunyi “Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang”.[9] Akibat bila semua isi perjanjian yang berupa hak dan kewajiban dilaksanakan, maka akan tercapailah tujuan perjanjian, artinya terpenuhinya prestasi. Jadi agar perjanjian mencapai tujuannya maka para pihak harus melakukan prestasi dengan baik sesuai isi perjanjiannya. Penelitian ini akan berfokus pada Kredit Usaha Rakyat yang dalam tulisan ini disingkat dengan KUR.

Kredit Usaha Rakyat (KUR) diluncurkan pada November 2007 dengan dilandasi keluarnya Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007. Hal ini bertujuan memperluas akses Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar dapat menikmati kredit perbankan serta meningkatkan produksi pada sektor riil di Indonesia.[10] Dalam perkembangannya, terdapat tambahan peraturan terkait program KUR sebagai

---

[7]R.Subekti, dan Tjitrosudibio. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Buku ketiga).* (Jakarta: PT.Pradnya Paramita). 2004. hlm 47.

[8]Izzah Putri Jurianto. *Apa Itu Debitur? Kenali Hak, Kewajiban, Serta Contohnya*. Diakses melalui https://finance.detik.com/moneter/d- 6858695/apa- itu- debitur- kenali- hak- kewajiban- se rta -contohnya,pada tanggal 05 Desember 2023 Pukul 20.00

[9]Mariam Darus Badrulzaman. *Kitab Undang-undang hukum perdata Buku ketiga: tentang hukum perikatan dengan penjelasan*. (Bandung: Alumni). 2011, hlm 61.

[10]Diakses melalui http://kur.ekon.go.id/, pada tanggal 11 Oktober 2023 Pukul 19.00

pedoman pelaksanaan penyaluran. KUR berperan penting bagi para debitur untuk mengatasi masalah permodalan, melalui kredit usaha rakyat dapat digunakan sebagai modal untuk memulai mengembangkan usaha sehingga semakin produktif sedangkan pemerintah melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) terus mendorong agar usaha mikro, kecil dan menengah dapat makin berkembang.[11]

Seperti kredit pada umumnya maka KUR juga perjanjiannya berisi hak dan kewajiban, tahap awal program KUR disediakan saat ini hanya terbatas oleh bank-bank yang ditunjuk oleh pemerintah saja, yaitu: Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Mandiri, Bank Syariah Mandiri, Bank Tabungan Negara dan Bank Bukopin. Penyaluran pola penjaminan difokuskan pada lima sektor usaha, yaitu pertanian, perikanan dan kelautan, koperasi, kehutanan, serta perindustrian dan perdagangan.[12] Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dimaksudkan untuk memperkuat kemampuan permodalan dalam rangka pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kredit usaha rakyat bersumber dari dana perbankan yang disediakan untuk keperluan modal kerja dan investasi dan disalurkan kepada pelaku Usaha mikro, kecil dan menengah baik perorangan atau kelompok usaha dalam wadah koperasi, yang memiliki usaha *feasible* tetapi belum *bankable.*[13]

PT. Bank Rakyat Indonesia berperan aktif dalam mendukung program pemerintah pusat yang salah satunya adalah pengembangan dan penyaluran program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Hadirnya Bank Rakyat Indonesia ditengah-tengah masyarakat memberikan banyak manfaat kepada masyarakat untuk bisa hidup menjadi lebih baik dari sisi finansial. Pemilihan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dipilih sebagai penambahan permodalan para debitur karena kecilnya tingkat bunga yang ditawarkan oleh bank rakyat indonesia berdasarkan Peraturan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman

---

[11]Harry ara hutabarat. *Kredit Usaha Rakyat : Berdayakan Usaha Rakyat, Tingkatkan Kesejahteraan*. (Jakarta : Badan Informasi Publik). 2008. hlm 18-20.

[12]Pratiwi dian, *analisis pemberian kredit usaha rakyat untuk calon debitur pada pt bank syariah mandiri.* diakses melalui .http://repository.fe.unj.ac.id/id/eprint/3298 pada tanggal 01 September 2023 Pukul 19.00.

[13]Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, *Prosedur Penyaluran Kredit Usaha Rakyat*, diakses melalui https://jdih.bpk.go.id, pada tanggal 23 Agustus 2023 Pukul 20.10 WIB

Pelaksanaan kredit usaha rakyat, ditetapkan pada 14 Januari 2020 yang sebelumnya adalah Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko) Nomor 8 Tahun 2019 mengeluarkan penurunan tingkat suku bunga KUR dari 7% ke 6% efektif pertahun atau 0,5% perbulan.[14] Bank Rakyat Indonesia telah memainkan peran penting dalam mendukung perekonomian rakyat Indonesia dengan menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Hingga tahun 2022, total senilai Rp. 252,38 triliun kepada kepada 6.583.105 debitur dana Kredit Usaha Rakyat BRI yang disalurkan.[15] Realisasi KUR untuk Provinsi Lampung per 30 November 2022 mencapai Rp10,12 Triliun untuk membiayai 240.871 pelaku usaha.[16]

Dengan rendahnya tingkat suku bunga kredit usaha rakyat yaitu 6% pertahun, Debitur banyak mengajukan kredit ini, namun disinyalir para debitur tidak melakukan kewajibannya (gagal bayar), padahal dibandingkan dengan kredit-kredit yang lain kredit usaha rakyat memiliki tingkat suku bunga pengembalian yang relatif rendah dan juga pada dasarnya pemberian kredit usaha rakyat diberikan tanpa mewajibkan adanya jaminan tambahan bagi debiturnya.[17] Jika tidak ingin terjadi kasus kredit bermasalah maka masing-masing pihak disemua perjanjian termasuk perjanjian KUR harus melaksanakan isi perjanjiannya. Berdasarkan hal-hal tersebut maka akan diangkat sebuah skripsi dengan judul **"Pelaksanaan Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Kotabumi".**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

---

[14]Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan kredit usaha rakyat, ditetapkan pada 14 Januari 2020.

[15]Aprilia Hariani, *Bri Kontributor Terbesar Deviden Terbesar 2022*, diakses melalui https://www.pajak.com/ekonomi/bri, pada tanggal 15 September 2023, Pukul 18.15 WIB.

[16]Diakses melalui https://djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/lampung/id/data-publikasi/berita-terbaru/2884-perkembangan-realisasi-kur-dan-umi-desember-2022.html, pada tanggal 15 September 2023, Pukul 20.00 WIB.

[17]Diakses melalui, https://finansial.bisnis.com/read/20230911/55/1693443/pinjaman-kur-tak-perlu-tambah-jaminan-hingga-rp100-juta-terlindungi-asuransi-kredit, diakses 02 Desember 2023 Pukul 19.00

1. Bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban antara pihak bank dan nasabah dalam pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Kotabumi?
2. Apakah hambatan dan penyelesaian sengketa yang timbul dari pelaksanaan pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Kotabumi?

1.3. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini mencakup ruang lingkup keilmuan dan ruang lingkup objek kajian, yaitu:

1.3.1. Ruang Lingkup Keilmuan

Ruang lingkup bidang ilmu dalam penelitian ini adalah Hukum Ekonomi khususnya Hukum Perbankan.

1.3.2. Ruang Lingkup Objek Kajian

Ruang lingkup objek kajian dalam penelitian ini adalah mengenai pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Kotabumi.

1.4. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis :

a. Pelaksanaan hak dan kewajiban antara pihak bank dan nasabah dalam pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Kotabumi.
b. Hambatan dan penyelesaiaan sengketa yang timbul dari pelaksanaan pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Kotabumi.

1.5. Kegunaan Penelitian

1.5.1. Kegunaan Teoretis

Diharapkan dapat mengembangkan dibidang Hukum Ekonomi dan Bisnis khususnya dengan Hukum Perbankan.

1.5.2. Kegunaan Praktis

a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat dan pelaku usaha UMKM mengenai pelaksanaan pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) beserta permasalahan yang ditimbulkan karenanya.

b. Menambah pengetahuan kepada mahasiswa dan dapat menjadi referensi atau acuan penelitian berkaitan dengan pembahasan hukum mengenai pelaksanaan pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang melibatkan Bank dan pelaku usaha.

c. Untuk memperoleh data dan informasi secara lebih jelas dan lengkap sebagai bahan untuk menyusun penulisan hukum guna melengkapi persyaratan dalam mencapai gelar kesarjanaan di bidang ilmu hukum Universitas Lampung.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Perjanjian dan Perjanjian Kredit Bank

2.1.1. Perjanjian pada umumnya

Keberadaan kredit sangat erat kaitannya dengan perjanjian dimana perjanjian tersebut terjadi antara pihak bank selaku pihak yang memberikan kredit dan pihak nasabah yang menerima pinjaman kredit. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.[18]

Perjanjian merupakan persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan dirinya untuk suatu hal dalam harta kekayaan. Dari rumusan perjanjian tersebut dapat diketahui unsur-unsur perjanjian sebagai berikut ada pihak-pihak sedikitnya dua orang (subjek), ada persetujuan antara pihak-pihak (konsensus), ada objek berupa benda, adanya tujuan yang bersifat kebendaan (mengenai harta kekayaan) dan ada bentuk tertentu lisan dan tertulis. Perjanjian melahirkan perikatan yang menciptakan kewajiban pada salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian, kewajiban yang dibebankan kepada debitur dalam perjanjian memberikan hak kepada kreditur dalam perjanjian untuk melaksanakan prestasi dalam perikatan yang lahir dari perjanjian tersebut.[19]

Menurut Wirjono Prodjodikoro, berpendapat bahwa perjanjian adalah suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dimana suatu pihak

---

[18] R. Subekti, *Hukum Perjanjian*.(Jakarta: Intermassa). 2005. hlm.12.
[19] Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaja. *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian.*(Jakarta: Rajawali Pers). 2014. hlm.35.

berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan hal, sedangkan pihak lain berhak untuk menuntut pelaksanaan tersebut.[20] Berdasarkan peristiwa ini timbulah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan karena perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan. Perjanjian juga disebut persetujuan karena dua pihak setuju untuk melaksanakan sesuatu. Suatu perjanjian sudah dianggap sah dalam arti sudah mempunyai akibat hukum atau sudah mengikat apabila sudah tercapai kata sepakat mengenai hal yang pokok dari perjanjian itu.

2.1.2. Asas-Asas Perjanjian

Perjanjian pada umumnya dikenal beberapa asas penting yang merupakan dasar kehendak pihak-pihak dalam mencapai tujuan. Beberapa asas tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Asas kebebasan berkontrak *(contractvrijheid)*

Asas kebebasan berkontrak *(contractvrijheid)*, berhubungan dengan isi perjanjian, asas ini mengandung pengertian bahwa setiap orang dapat mengadakan perjanjian apapun juga, baik yang telah diatur dalam undang-undang, maupun yang belum diatur dalam undang-undang.[21] Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPdt yang berbunyi "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya." Asas kebebasan berkontrak adalah salah satu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk :[22]

(1) Membuat atau tidak membuat perjanjian,
(2) Mengadakan perjanjian dengan siapapun,
(3) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, dan
(4) Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

Batasan dalam membuat suatu perjanjian dapat dilihat dalam Pasal 1337 KUHPdt yang menyatakan bahwa "Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh

[20] Wiryono Projodikiro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*. (Bandung: Mandar Maju). 2000. hlm.17.
[21] Mariam Darus Badrulzaman dkk. *Kompilasi Hukum Perikatan*. (Bandung:Citra Aditya Bakti). 2001. hlm.108.
[22] Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti). 2002. hal. 12

Undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.". Kemudian pembatasan terhadap asas kebebasan berkontrak juga dapat disimpulkan melalui pasal 1338 ayat (3) yang menyatakan bahwa "suatu perjanjian hanya dilaksanakan dengan itikad baik." Oleh karena itu para pihak tidak dapat menentukan sekehendak hatinya klausul-klausul yang terdapat dalam perjanjiian tetapi harus didasarkan dan dilaksanakan dengan itikad baik.

b. Asas Konsensualisme (Persesuaian Kehendak)

Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPdt. Dalam pasal itu ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak. Asas konsensualisme merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan merupakan persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.[23]

c. Asas kepastian hukum *(Pacta Sunt Servanda)*

Asas *pacta sunt servanda* atau disebut juga dengan asas kepastian hukum. Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak.[24]

d. Asas Itikad Baik *(Goede Trouw)*

Asas iktikad baik tercermin dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan "Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik". Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata ini pada umumnya selalu dihubungkan dengan Pasal 1339 KUHPerdata, bahwa "Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.".[25] Asas itikad baik dibagi menjadi dua macam yaitu itikad baik nisbi dan

---

[23] Ridwan Khirandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan, Bagian Pertama,* (Yogyakarta: FH UII Press). 2013, hlm. 90.
[24] Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, (Jakarta: Sinar Grafika,).2001. hlm. 158
[25] R. Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata Cetakan ke-31*, (Jakarta: PT Pradnya Paramitha) 2001. hlm. 339

itikad baik mutlak. Pada itikad baik nisbi, orang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Pada itikad baik mutlak, penilaiannya terletak pada akal sehat dan keadilan, dibuat ukuran yang objektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma yang objektif.[26]

e. Asas Kepribadian (Personalitas)

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 KUHPdt yang menyatakan bahwa "Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.". Menurut ketentuan Pasal 1340 KUHPdt berbunyi "Perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya.". Namun ketentuan itu ada pengecualiannya, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1317 KUHPdt, yang menyatakan bahwa "Dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu."

2.1.3. Syarat Sah Perjanjian

Syarat sahnya suatu atau sebuah perjanjian terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Dalam Pasal 1320 KUHPerdata menyebutkan bahwa sahnya suatu perikatan diperlukan 4 (empat) syarat:[27]

a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, Kesepakatan para pihak merupakan unsur mutlak untuk terjadinya suatu perjanjian kesepakatan itu dapat terjadi dengan berbagai cara, namun yang paling penting adalah penawaran dan penerimaan atas penawaran tersebut.

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, maksudnya adalah bahwa pihak yang melakukan kontrak haruslah orang yang oleh hukum memang berwenang membuat kontrak tersebut. Sebagaimana pada pasal 1330 KUHPdt menentukan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan, kecuali undang-undang menentukan bahwa pihak tersebut tidak cakap. Mengenai orang-orang

[26] Salim H.S. *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak, Cet.II*.(Jakarta: Sinar Grafika).2004. hlm. 40.
[27]R Subekti dan Tjitrosudibio.*Op. cit.* hlm. 350.

yang tidak cakap untuk membuat perjanjian dapat kita temukan dalam pasal 1330 KUHPdt.

c. Sesuatu pokok persoalan tertentu, objek perjanjian itu harus jelas dan ditentukan oleh para pihak, objek perjanjian tersebut dapat berupa barang maupun jasa, namun dapat juga berupa tidak berbuat sesuatu. Hal tertentu ini dalam perjanjian disebut prestasi yang dapat berwujud barang, keahlian atau tenaga, dan tidak berbuat sesuatu.
d. Sesuatu sebab yang halal (tidak terlarang) yang dimaksud dengan sebab yang halal dalam Pasal 1320 KUHPdt itu bukanlah sebab dalam arti yang yang mendorong orang membuat perjanjian, melainkan sebab dalam arti "isi perjanjian itu sendiri" yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh pihak-pihak.

Dari keempat syarat sahnya suatu perjanjian dapat dibedakan atas adanya syarat-syarat subjektif yang merupakan syarat yang berkenaan dengan orang atau subjek yang mengadakan perjanjian, dan adanya syarat-syarat objektif yang berkenaan dengan objek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.[28]

2.2. Perjanjian Pinjam Meminjam

Mengenai perjanjian pinjam-meminjam pengaturannya terdapat dalam Buku ke III Bab XIII KUHPerdata. Pasal 1754 KUHPerdata menyatakan : "Pinjam-meminjam adalah persetujuan dengan mana pihak kreditur memberikan kepada pihak yang lain (debitur) sejumlah barang atau uang yang dapat habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak debitur akan mengembalikan sejumlah barang/uang yang sama dari jenis dan keadaan yang sama pula." [29]

Ketentuan Pasal 1754 KUHPerdata tersebut menunjukkan bahwa seseorang yang meminjamkan sejumlah uang atau barang tertentu kepada pihak lain, pihak lain akan memberi kembali sejumlah uang yang sama sesuai dengan persetujuan yang disepakati. Dari pengertian tersebut diatas kiranya dapat dilihat beberapa unsur yang terkandung dalam suatu perjanjian pinjam meminjam diantaranya:

[28] Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan.* (Jakarta:Raja Grafindo Persada). 2011. hlm. 63

[29] R Subekti dan Tjitrosudibio. *Op. cit.* 2004. hlm. 40.

a. Adanya para pihak

Pihak pertama memberikan prestasi kepada pihak lain suatu jumlah tertentu barang-barang dengan syarat bahwa pihak kedua ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

b. Adanya persetujuan

Dimana pihak pertama dan kedua membuat perjanjian bersama yang menyangkut dengan waktu, kewajiban dan hak-hak masing-masing yang dituangkan dalam bentuk perjanjian.

c. Adanya sejumlah barang tertentu

Barang tersebut dipercayakan dari pihak pertama kepada pihak kedua.

d. Adanya pengembalian Pinjaman

Bahwa pihak kedua akan menyerahkan sejumlah tertentu barang-barang kepada pihak yang pertama. Perjanjian pinjam meminjam tersebut dapat juga dikatakan perjanjian pinjam penganti karena objek pinjaman itu hanya/terdiri dari benda yang habis dalam pemakaian, tetapi dapat pula berupa uang sedangkan pinjaman habis dalam pemakaian terdiri dari benda yang tidak habis dalam pemakaian pinjam meminjam uang merupakan perjanjian kesensuai dan riil. Apabila dua pihak telah mufakat mengenai semua unsur dalam perjanjian pinjam meminjam uang maka tidak berarti bahwa perjanjian tentang pinjam uang itu telah terjadi. Yang hanya baru terjadi adalah perjanjian untuk mengadakan perjanjian pinjam uang. Apabila uang yang diserahkan kepada pihak peminjam,

Berdasarkan perjanjian pinjam-meminjam Pasal 1755 KUHPerdata, pihak yang menerima pinjaman menjadi pemilik dari barang yang dipinjam, dan jika barang itu musnah dengan cara bagaimanapun, maka kemusnahan itu adalah atas tanggungannya. Dalam hal peminjam uang menurut Pasal 1756 KUHPerdata utang yang terjadi karenanya hanyalah terdiri atas jumlah uang yang disebutkan dalam perjanjian, apabila sebelum saat pelunasan terjadi suatu kenaikan atau kemunduran harga atau ada perubahan mengenai berlakunya mata uang, maka pengembalian jumlah yang dipinjam harus dilakukan dalam mata uang yang berlaku pada waktu perlunasan, dihitung menurut harganya yang berlaku saat itu.

Mengenai pinjaman uang dengan bunga Pasal 1765 KUHPerdata menyebutkan bahwa diperbolehkan memperjanjikan bunga atas pinjaman uang atau barang lain yang telah menghabiskan karena pemakaian. Pembayaran bunga telah sudah dibayar tidak diwajibkan yang berutang untuk membayar seterusnya, tetapi bunga yang telah diperjanjikan harus dibayar sampai ada pengembalian atau penitipan uang pokoknya, biarpun pengembalian atau penitipan ini telah dilakukan setelah atau lewatnya waktu hutangnya dapat ditagih.

2.3. Perjanjian Kredit Bank

Perjanjian kredit adalah perjanjian pokok (prinsipil) yang bersifat riil. Sebagai perjanjian prinsipil maka perjanjian jaminan adalah *assessoir*-nya. Ada dan berakhirnya perjanjian jaminan bergantung pada perjanjian pokok. Arti riil ialah bahwa terjanjinya perjanjian kredit ditentukan oleh penyerahan uang oleh bank kepada nasabah debitur.[30] Persetujuan pinjam-meminjam antara bank dengan lain pihak (nasabah) di mana pihak peminjam berkewajiban melunasi pinjamannya setelah jangka waktu tertentu dengan bunga yang telah ditetapkan itu dinamakan ”perjanjian kredit” atau ”akad kredit”. Pemberian kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan.

2.3.1. Unsur-Unsur Perjanjian Kredit Bank

Pengertian kredit jika dilihat secara utuh mengandung beberapa makna, adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian fasilitas kredit adalah kepercayaan, kesepakatan, jangka waktu, resiko dan balas jasa :[31]

a. Kepercayaan

Yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (berupa uang,barang atau jasa) akan benar-benar diterima kembali di masa tertentu di masa yang akan datang. Kepercayaan ini diberikan bank setelah dilakukan penelitian

[30]Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup). 2006. hlm. 71.
[31]Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada,). 2015. hlm.97.

tentang nasabah baik secara intern maupun eksteren dengan penelitian kondisi masa lalu dan sekarang terhadap nasabah pemohon kredit.

b. Kesepakatan.

Disamping unsur percaya di dalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam bentuk suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.

c. Jangka Waktu.

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu itu mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang.

d. Resiko.

Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu resiko tidak tertagihnya atau macetnya pemberian kredit. Semakin panjang suatu kredit akan semakin besar resikonya demikian pula sebaliknya. Resiko ini menjadi tanggungan bank, baik resiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai maupun oleh resiko yang tidak disengaja, misalnya terjadi bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya.

e. Balas Jasa.

Merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang dikenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan bank. Sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip balas jasa ditentukan dengan bagi hasil. Setiap perjanjian tentu mengandung adanya prestasi dan kontraprestasi. Oleh karena itu, dalam perjanjian kredit sejak saat adanya kesepakatan atau persetujuan dari kedua belah pihak (bank dan nasabah debitor) telah menimbulkan hubungan hukum atau menimbulkan hak dan kewajiban dan masing-masing pihak sesuai kesepakatan yang telah mereka sepakati.

2.3.2. Prinsip-Prinsip Dalam Pemberian Kredit Bank

Bank sudah barang tentu berkeinginan agar kredit yang diberikan tidak menjadi kredit yang bermasalah dikemudian hari. Oleh karena itu sebelum memberikan

kredit maka bank harus memeberikan panilaian yang seksama terhadap watak *(character)*, kemampuan *(capacity)*, modal *(capital)*, agunan *(collateral)* dan prospek usaha dari nasabah debitur (*condition of economy*), yang lazim disebut dengan *the five C of credit analysis* atau prinsip *5C's*. Dalam hal ini menjadi keharusan bagi bank menilai secara seksama unsur *5C's* sebagai dasar dalam pemberian kredit yang bersangkutan, yang meliputi:[32]

a. Penilaian watak/kepribadian *(character)*

penilaian ini dimaksudkan untuk mengetahui kejujuran atau itikad baik calon debitur untuk melunasi atau mengembalikan pinjamannya, sehingga tidak akan menyulitkan bank di kemudian hari.

b. Penilaian kemampuan *(capacity)*

Bank harus meneliti tentang keahlian calon debitur dalam bidang usahanya dan kemampuan manajerialnya, sehingga bank yakin bahwa usaha yang akan dibiayainya dikelola oleh orang-orang yang tepat, sehingga calon debiturnya dalam jangka waktu tertentu mampu melunasinya.

c. Penilaian terhadap modal *(capital)*

Bank harus melakukan analisis terhadap posisi keuangan secara menyeluruh mengenai masa lalu dan yang akan datang, sehingga dapat diketahui kemampuan permodalan calon debitur dalam menunjang pembiayaan proyek atau usaha calon debitur yang bersangkutan.

d. Penilaian terhadap agunan *(collateral)*

Untuk menanggung pembayaran kredit macet dikarenakan debitur wanprestasi, maka calon debitur umumnya wajib menyediakan jaminan yang umumnya berkualitas tinggi dan mudah dicairkan yang nilainya minimal sejumlah kredit atau pembiayaan yang diberikan kepadanya.

e. Penilaian terhadap prospek usaha nasabah debitur *(condition of economy)*

Bank harus menganalisis keadaan pasar di dalam dan di luar negeri, baik masa lalu maupun yang akan datang, sehingga masa depan pemasaran dari proyek atau usaha

[32] Niniek Wahyuni, *Penerapan Prinsip 5C dalam Pemberian Kredit Sebagai Perlindungan Bank*. (Surabaya: Journal Unitomo). 2017. hlm.3.

calon debitur sehingga masa depan pemasaran dari hasil proyek atau usaha calon debitur yang dibiayai dapat pula diketahui.

Prinsip 5C dalam pemberian kredit tersebut di atas telah digunakan selama bertahun-tahun dan kenyataannya pada saat ini masih terus dipergunakan. Karakter tidak diragukan lagi adalah faktor yang sangat penting untuk dipertimbangkan jika ingin memberikan kredit. Saat debitur tidak jujur, curang, ataupun *incompetence*, maka kredit tidak akan berhasil tanpa perlu memperhatikan faktor-faktor lainnya. Orang yang tidak jujur ataupun curang akan selalu mencari jalan untuk mengambil keuntungan. Seseorang yang *incompetence* menjalankan bisnis tidak diragukan lagi akan menjalankan bisnisnya dengan buruk, dan hasilnya kredit akan mengandung resiko tinggi. Jika seseorang tidak ingin membayar kembali kreditnya, kemungkinan ia akan mencari jalan untuk menghindari membayar kembali. Terkait itu, penilaian karakter debitur harus ditentukan sejak ia memulai langkah pertama untuk mendapatkan pinjaman. Saat menentukan karakter, debitur harus mampu menunjukkan kepada bank bahwa ia adalah orang yang jujur dan dapat diandalkan. Terkait itu dibutuhkan adanya *track record* (rekam jejak) dari yang bersangkutan. Tentu saja untuk melakukan hal ini sangat sulit. Di Indonesia informasi tentang nasabah dapat diperoleh melalui sistem informasi kredit yang dimiliki Bank Indonesia. Namun karena tidak adanya sistem “kenal diri” yang berlaku nasional sehingga seorang dapat memiliki identitas diri lebih dari satu informasi itu seringkali tidak akurat.

2.3.3. Isi dan Pelaksanaan Perjanjian Bank

Isi dari perjanjian itu sendiri adalah berupa hubungan hukum yang timbul dari adanya hak dan kewajiban diantara masing-masing pihak yang mengikatkan dirinya pada sebuah perjanjian. Hubungan hukum adalah hubungan yang diatur oleh hukum. Hubungan hukum yang diatur oleh hukum itu adalah hak dan kewajiban warga, pribadi yang satu terhadap warga, pribadi yang lain dalam hidup bermasyarakat. Jadi, hubungan hukum adalah hak dan kewajiban hukum setiap warga atau pribadi dalam hidup bermasyarakat. Hak dan kewajiban tersebut apabila tidak terpenuhi dapat dikenakan sanksi menurut hukum. Hal yang harus dilaksanakan dalam suatu perjanjian disebut “Prestasi”. Apabila prestasi tersebut

terpenuhi maka tercapailah tujuan dari pelaksaan perjanjian itu sendiri dan sebaliknya. Menurut Pasal 1234 KUHPdt wujud prestasi ada tiga, yaitu, memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu.

Perjanjian kredit pada umumnya dituangkan secara tertulis. Pihak bank yang menetapkan persyaratan-persyaratan kredit dan pihak nasabah menerima persyaratan yang telah ditetapkan dengan ditandatanganinya perjanjian kredit itu. Berdasarkan hal tersebut, perjanjian kredit sangat erat kaitannya dengan keberadaan perjanjian sebagaimana diatur dalam hukum perdata, walaupun pengertian perjanjian kredit itu sendiri tidak disebutkan dalam KUH Perdata. Perjanjian kredit adalah perjanjian pokok (prinsipil) yang bersifat riil. Sebagai bentuk perjanjian prinsipil, maka perjanjian jaminan adalah assessornya. Ada dan berakhirnya perjanjian jaminan bergantung pada perjanjian pokok. Arti riil adalah terjadinya perjanjian kredit ditentukan oleh penyerahan uang oleh bank kepada nasabah debitor.[33]

Istilah Kredit terdapat pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang diundangkan pada Lembaran Negara No.31 tahun 1992, diterbitkan di Jakarta pada tanggal 10 November 1998 dalam penelitian ini disingkat dengan UUPB. Berdasarkan pada Pasal 1 angka 11 UUPB berbunyi "Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga."

2.4. Bank dan Kredit Usaha Rakyat

2.4.1. Bank Pelaksana Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Berdasarkan sejarah dari terminologi "bank" maka akan kita temukan bahwa kata bank berasal dari bahasa Italia "*banca*" yang berarti bence yaitu suatu bangku tempat duduk. Sebab, pada zaman pertengahan pihak banker Italia memberikan pinjaman pinjaman melakukan usahanya tersebut dengan duduk dibangku-bangku

[33] Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*.(Jakarta: Kencana Prenada Media Group). 2005.hlm.64.

di halaman pasar.[34]Dalam perkembangan dewasa ini, maka istilah bank dimaksudkan sebagai jenis pranata finansial yang melaksanakan jasa-jasa keuangan yang cukup beranekaragam, seperti pinjaman, memberi pinjaman, mengedarkan mata uang, mengadakan pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha-usaha perusahaan.

Berdasarkan dengan UUPB, Fungsi Perbankan adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Hal ini berarti bahwa perbankan dituntut peranannya yang lebih aktif dalam menggali dana dari masyarakat dalam rangka pembangunan nasional. Bank Rakyat Indonesia (BRI) adalah salah satu bank yang memberikan kepuasan kepada nasabahnya dengan meningkatkan kinerja, layanan, dan produk demi mempermudah transaksi para nasabah. Bank Rakyat Indonesia yang memiliki tujuan untuk menjadi Bank komersial terkemuka yang selalu mengutamakan kepuasan nasabah dengan produk jasanya. Berikut ini adalah produk – produk yang diberikan oleh BRI :[35]

(1) Produk Simpanan Bank BRI Beberapa produk simpanan BRI sebagai bentuk layanan publik antara lain Tabungan BRI, Deposito BRI, dan Giro BRI.

(2) Produk Pinjaman Bank BRI.

a. Pinjaman Mikro BRI

Produk Pinjaman Mikro yang dikeluarkan oleh Bank BRI adalah Kupedes, yaitu fasilitas kredit dengan bunga sangat ringan yang ditujukan untuk perorangan dan dapat dilayani di BRI Unit maupun Teras BRI.

b. Produk Pinjaman Menengah Bank BRI

Produk pinjaman ini berupa kredit Agribisnis, yaitu fasilitas kredit yang diberikan untuk kegiatan pertanian.

c. KUR BRI

KUR yang dikeluarkan oleh Bank BRI yaitu KUR BRI dan KUR TKI BRI.

---

[34] A. Abdurrachman, *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan*, (Jakarta: Pradya Paramita digital). 2007. hlm. 80.
[35] Thomas Suyatno, *Kelembagaan Perbankan*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama) 2003. hlm.207.

Tugas pokok bank adalah membantu pemerintah dalam mengatur, menjaga dan memelihara kestabilan nilai rupiah, serta mendorong kelancaran produksi dan pembangunan dalam memperluas kesempatan kerja guna meningkatkan taraf hidup rakyat. Jika melihat dari uraian diatas, Bank Rakyat Indonesia sangat erat kaitannya dengan kegiatan peredaran uang, dalam rangka melancarkan seluruh aktivitas keuangan masyarakat. Dengan demikian, Bank Rakyat Indonesia (BRI) memiliki peranan penting yang berfungsi sebagai: [36]

(1) Pedagang dana (*money lender*), yaitu wahana yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efesien. Bank menjadi tempat untuk penitipan dan penyimpanan uang yang dalam prakteknya sebagai tanda penitipan dan penyimpan uang tersebut, maka kepada penitip dan penyimpan diberikan selembar kertas tanda bukti. Sedangkan dalam fungsinya sebagai penyalur dana, maka bank memberikan kredit atau membelikannya kedalam bentuk surat-surat berharga.

(2) Lembaga yang melancarkan transakasi perdagangan dan pembayaran uang. Bank bertindak sebagai penghubung antara nasabah yang satu dan nasabah yang lainnya jika keduanya melakukan transaksi. Dalam hal ini kedua pihak tersebut tidak secara langsung melakukan pembayaran, tetapi cukup memerintahkan kepada bank untuk menyelesaikannya.

2.4.2. Jenis-Jenis Lembaga Bank

Menurut jenisnya Bank terdiri atas Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat, berdasarkan ketentuan UUPB Pasal 1 Angka 3 mengatur bahwa Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, Sedangkan dalam UUPB dalam Pasal 1 ayat 4 mengatur bahwa Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Penjabaran mengenai Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat secara umum dapat dijelaskan bahwa :

a. Bank Umum

---

[36] *Ibid. 220*

Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasadalam lalu lintas pembayaran. Dengan sendirinya bank umum adalah bank pencipta uang giral. Bank Umum dapat mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu atau memberikan perhatian yang lebih besar kepada kegiatan tertentu. Kegiatan tertentu tersebut antara lain melaksanakan kegiatan pembiayaan non migas, dan pengembangan pembiayaan jangka panjang, pembiayaan untuk pengembangan koperasi, pengembangan pengusaha golongan ekonomi lemah/pengusaha kecil, pengembangan ekspor non migas, dan pengembangan pembangunan perumahan.[37]

b. Bank Perkreditan Rakyat

Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dengan sendirinya bank perkreditan rakyat bukan pencipta uang giral, sebab Bank Perkreditan Rakyat tidak ikut memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.[38]

2.4.3. Pengertian Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Menurut peraturan menteri keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tentang fasilitas penjaminan Kredit Usaha Rakyat, pengertian KUR adalah kredit atau pembiayaan kepada UMKM (Usaha Mikro, Kecil, Menengah) dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif.[39] KUR merupakan fasilitas kredit yang khusus diberikan kepada kegiatan usaha Mikro Kecil Menengah yang usahanya cukup layak namun tidak memiliki agunan yang cukup sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh pihak perbankan. Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit atau pembiayaan yang diberikan oleh perbankan kepada UMKM-K yang *feasible* tapi belum *bankable*. Maksudnya adalah usaha tersebut memiliki prospek bisnis yang baik dan memiliki kemampuan

---

[37] Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Islam*. (Bandung: Citra Aditya Bakti). 2002. hlm. 62.
[38] *Ibid*. hlm.65.
[39] Sri Mulyani, *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 Tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat.* Diakses melalui https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2008/135~PMK.05~2008Per.HTM pada tanggal 02 februari 2024. Pukul 20.00 WIB.

untuk mengembalikan. Tujuan program KUR adalah mengakselerasi pengembangan kegiatan perekonomian di sektor riil dalam rangka penanggulangan dan pengentasan kemiskinan serta perluasan kesempatan kerja. Secara lebih rinci, tujuan program KUR adalah sebagai berikut:

a. Mempercepat pengembangan sektor riil dan pemberdayaan usaha mikro kecil, menengah (UMKM)
b. Meningkatkan akses pembiayaan dan mengembangkan UMKM kepada lembaga keuangan.
c. Sebagai upaya penanggulangan/pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja.

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah program dari pemerintah berupa pinjaman modal usaha yang dananya 100% dari bank pelaksana KUR untuk rakyat Indonesia yang produktif dan Layak namun belum *bankable* dengan plafon sampai dengan Rp. 500.000.000; (lima ratus juta rupiah) yang dijamin oleh Perusahaan Penjamin Askrindo. Dana yang digunakan berasal dari bank pelaksana maka bunga dan sistemnya berbeda-beda. KUR BRI ditujukan pada sektor pertanian, perikanan dan industri pengolahan, dan sektor perdagangan.[40]

Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dalam mendukung program Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian memutuskan untuk menurunkan suku bunga KUR tahun 2016 ke 2023 dari semula 9% tahun 2016-2017, kemudian 2018-2019 turun kembali menjadi 7% dan saat ini menjadi sebesar 6% per tahun 2023.[41] Selain sumbangsih yang besar terhadap perekonomian Indonesia, UMKM juga merupakan salah satu solusi untuk mengurangi ketimpangan maupun kesenjangan pendapatan masyarakat Indonesia, karena sektor ini mempunyai ketahanan ekonomi yang tinggi. Hal ini yang mendorong pemerintah untuk terus menciptakan dan mendukung program pemberdayaan ekonomi berbasis kerakyatan. Pemerintah telah mencanangkan upaya peningkatan akses sumber pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah

[40]Azarine Yus, *Syarat Cara Mengajukan KUR*, diakses melalui https://www.bank-bri-bcamandiri.info/2016/01/syarat-cara-mengajukan-kur-bri-terbaru.html, Pada tanggal 16 agustus 2023 Pukul 14:00 WIB

[41] Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023,*Tentang Pedoman Pelaksanaan KUR*, pasal 22 ayat 2 , ditetapkan pada 25 januari 2023.

dan Koperasi guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR)[42]

2.4.4. Dasar Hukum Kredit Usaha Rakyat

Dasar hukum pelaksanaan KUR di Indonesia diatur dalam beberapa ketantuan, antara lain :

a. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 ditetapkan pada 7 Mei 2015 yang direvisi dengan keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang komite kebijakan pembiayaann bagi Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) yang ditetapkan 15 Juli 2015.
b. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan KUR yang ditetapkan pada 26 Oktober 2015.
c. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah yang ditetapkan pada 14 Januari 2016.
d. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 188 Tahun 2015 Tentang Penyalur KUR dan perusahaan penjamin KUR yang ditetapkan pada tanggal 30 Oktober 2015.
e. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan KUR yang ditetapkan pada 19 Januari 2022.
f. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023 Perubahan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang ditetapkan pada 25 Januari 2023.

Dasar hukum pelaksanaan KUR di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk :[43]

a. Surat Edaran Direksi Nomor 21-DIR/ADK/08/2015 Tanggal 13 Agustus 2015 Tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro beserta perubahannya.

---

[42]Kementrian bidang perekonomian, *Gambaran Umum KUR*, diakses melalui kur.ekon.go.id/gambaran-umum, Pada tanggal 26 Agustus 2023, Pukul 21.20 WIB

[43]Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, *Landasan Hukum*, http://kur.ekon.go.id/landasan-hukum, diakses pada tanggal 16 agustus 2023 Pukul 14.25 WIB

b. Surat Edaran Direksi Nomor 26-DIR/ADK/08/2015 Tanggal 18 November 2015 Tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) TKI beserta perubahannya.
c. Peraturan Menteri Koordinator Perekonomian RI (Permenko) Nomor 11 Tahun 2017 tanggal 15 Desember 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

2.5. Tinjauan tentang Jaminan Kredit

2.5.1. Pengertian Jaminan Kredit

Dalam memberikan fasilitas kredit kepada debitur, kreditur harus mengetahui dengan jelas apakah debitur mempunyai itikad baik untuk mengembalikan fasilitas kredit tersebut tepat pada waktunya. Faktor terpenting yang harus diteliti oleh kreditur adalah adanya jaminan yang dapat digunakan untuk melunasi hutang debitur kepada kreditur sehingga bila suatu saat debitur wanprestasi, maka kreditur dapat menjual barang yang diagunkan tersebut untuk melunasi hutang debitur kepada kreditur. Sehingga untuk mengurangi risiko kerugian kreditur, maka diadakan suatu jaminan hutang piutang oleh para pihak yang menyerahkan barang milik debitur kepada kreditur sebagai jaminan dilaksanakannya kewajiban debitur kepada kreditur. Dalam KUHPdt, pengaturan mengenai jaminan secara umum terhadap pelunasan hutang dapat kita lihat dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdata. Jaminan kebendaan adalah jaminan yang mempunyai hubungan langsung dengan benda tertentu. Jaminan ini selalu mengikuti bendanya, ke manapun benda tersebut beralih atau dialihkan. Serta dapat dialihkan kepada dan dapat dipertahankan terhadap siapun. Jaminan kebendaan yang bersifat khusus mencakup penentuan/penunjukan atas benda tertentu milik debitur atau milik pihak ketiga untuk menjadi jaminan utangnya kepada kreditur.[44]

2.5.2. Fungsi Jaminan Kredit

Sebagaimana telah dikemukakan pemberian kredit adalah salah satu bentuk pinjaman uang. Dalam suatu pinjamam uang sering dipersyaratkan adanya jaminan hutang yang dapat terdiri dari berbagai bentuk dan jenis. Mengenai fungsi jaminan

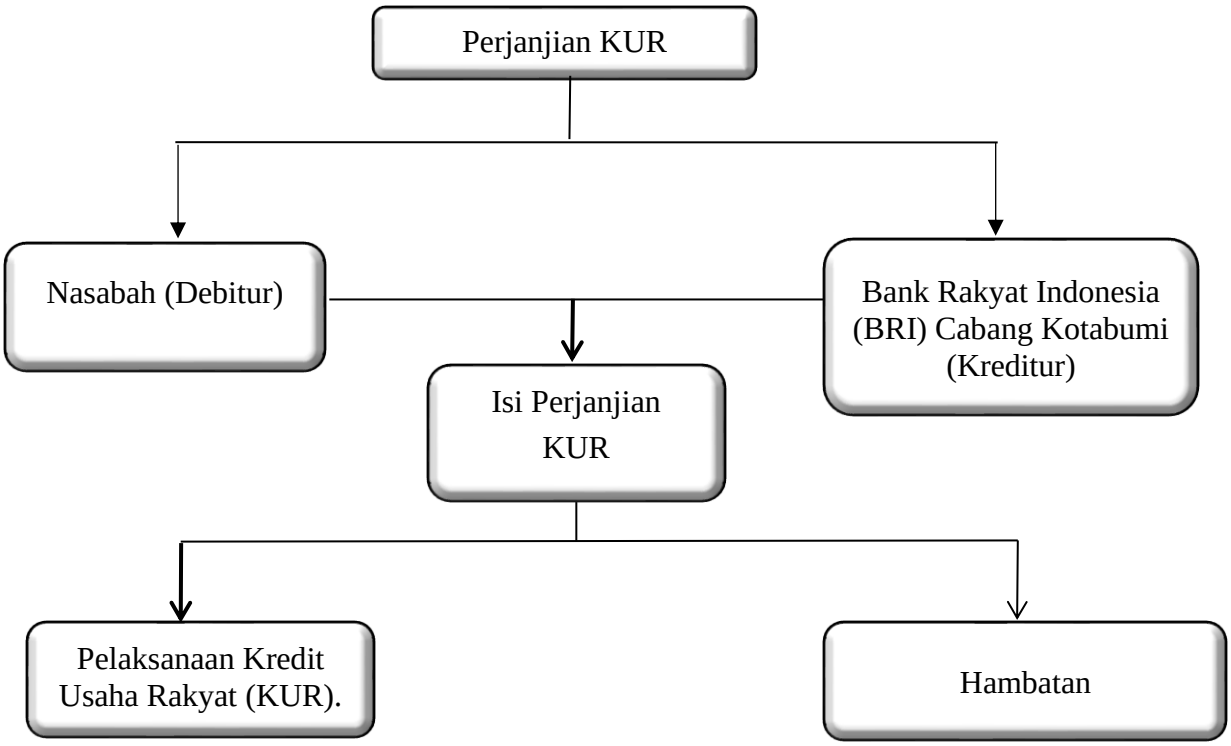
[44] Munir Fuady, *Hukum Jaminan Utang*. (Jakarta: Erlangga). 2013.hlm.10.

kredit baik ditinjau dari sisi bank maupun dari sisi debitur dikemukakan lebih lanjut sebagai berikut:[45]

a. Jaminan Kredit sebagai Pengamanan Pelunasan Kredit Fungsi jaminan kredit untuk mengamankan pelunasan kredit baru akan muncul pada saat kredit dinyatakan sebagai kredit macet. Selama kredit telah dilunasi oleh debitur, tidak akan terjadi pencairan jaminan kreditnya. Dalam hal ini jaminan kredit akan dikembalikan kepada debitur yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan hukum dan perjanjian kredit. Fungsi jaminan kredit untuk mengamankan pelunasan kredit sangat berkaitan dengan kepentingan bank yang meyalurkan dananya kepada debitur yang sering dikatakan mengandung risiko.
b. Jaminan Kredit sebagai Pendorong Motivasi Debitur Pengikatan jaminan kredit yang berupa harta milik debitur yang dilakukan oleh pihak bank, tentunya debitur yang bersangkutan takut akan kehilangan hartanya tersebut. Hal ini akan mendorong debitur berupaya untuk melunasi kreditnya kepada bank agar hartanya yang dijadikan jaminan kredit tersebut tidak hilang karena harus dicairkan oleh bank.
c. Fungsi yang Terkait dengan Pelakasanaan Ketentuan Perbankan Keterkaitan jaminan kredit dengan ketentuan perbankan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, misalnya dapat diperhatikan dari ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang penialian aguanan sebagai faktor pengurang dalam perhitungan PPA(Penyisihan Penghapusan Aset). Keterkaitan dengan ketentuan-ketentuan dari berbagai peraturan perundang-undangan tentang perbankan merupakan fungsi lain dari jamianan kredit dan mendukung keharusan penilaian jaminan kredit secara lengkap oleh bank sehingga akan merupakan jaminan yang layak dan berharga.

[45]M. Bahsan, *Hukum Jaminan (Jamian Kredit Perbankan Indonesia)*. (Jakarta: Rajawali Pers). 2012. hlm.102.

2.6. Kerangka Pikir



Keterangan :

Perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan salah satu instrumen penting yang mendukung pertumbuhan usaha kecil dan mikro di Indonesia. Dalam konteks ini, Debitur, yang merupakan pihak yang meminjam dana, melakukan perjanjian dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Kotabumi untuk mendapatkan akses ke fasilitas kredit yang diperlukan untuk mengembangkan usahanya. Sebelum tanda tangan perjanjian, kedua belah pihak melakukan serangkaian persiapan yang komprehensif. Ini melibatkan diskusi dan negosiasi mengenai berbagai aspek pinjaman, termasuk jumlah dana yang akan dipinjamkan, suku bunga yang akan diterapkan, jangka waktu pinjaman, serta persyaratan jaminan yang harus dipenuhi oleh Debitur.

Isi perjanjian kredit mencakup beragam detail penting yang perlu dipahami oleh kedua belah pihak. Ini termasuk butir-butir seperti jumlah pinjaman yang disepakati, baik dalam bentuk nominal maupun dalam hal pembagian anggaran penggunaannya. Selain itu, perjanjian juga akan merinci jadwal pembayaran

angsuran, termasuk tanggal jatuh tempo dan besaran setiap angsuran yang harus dibayarkan oleh Debitur kepada Bank. Jenis jaminan yang diberikan oleh Debitur juga akan dicantumkan dalam perjanjian, baik dalam bentuk agunan berupa aset fisik maupun dalam bentuk jaminan lainnya.

Setelah perjanjian ditandatangani, Debitur akan mulai menerima dana pinjaman sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan. Dana ini akan digunakan untuk berbagai keperluan yang berkaitan dengan pengembangan usaha, seperti modal kerja, investasi dalam aset produktif, atau pengembangan infrastruktur. Namun, dalam pelaksanaan perjanjian, mungkin saja muncul beberapa hambatan atau tantangan yang perlu diatasi. Salah satunya adalah kesulitan Debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran angsuran, yang bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti fluktuasi pendapatan usaha atau kondisi ekonomi yang tidak stabil.

Tantangan lainnya mungkin timbul dalam proses administrasi perjanjian, seperti keterlambatan pencairan dana pinjaman dari bank akibat proses verifikasi yang kompleks atau masalah internal di dalam bank. Selain itu, masalah dalam penilaian dan pengelolaan jaminan yang diberikan oleh Debitur kepada bank juga bisa menjadi hambatan tersendiri. Dalam menghadapi hambatan-hambatan ini, komunikasi yang baik antara kedua belah pihak sangatlah penting. Pengawasan yang ketat dan komunikasi yang terus-menerus diperlukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan perjanjian berjalan dengan lancar dan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati, serta untuk meminimalkan potensi konflik atau ketidaksepahaman di antara kedua belah pihak.

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.[46] Metode penelitian merupakan suatu cara yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian dan membandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan.[47] Dalam hal ini penulis menggunakan beberapa perangkat penelitian yang sesuai dengan metode penelitian ini guna memperoleh hasil yang maksimal, antara lain sebagai berikut:

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Pada penelitian hukum akan diperiksa secara mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.[48]

Berdasarkan segi fokus kajiannya, penelitian hukum dapat dibedakan menjadi tiga tipe yaitu penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif-empiris atau normatif-terapan, dan penelitian hukum empiris.[49] Jenis penelitian yang digunakan pada penulisan ini yaitu, penelitian hukum normatif-empiris dimana penulis mengkaji pelaksanaan pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Rakyat Indonesia.

---

[46] Cholid Narbuko dan Abu A, *Metodologi Penelitian,* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm. 1.
[47] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 126.
[48]Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum,* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2005), hlm. 39
[49]Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum,* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 52.

3.2. Tipe Penelitian

Berdasarkan sifat dan tujuannya, tipe penelitian hukum dibagi menjadi 3 yaitu:[50]

1) Penelitian Hukum Eksploratori *(exploratory legal study)* Dapat diartikan sebagai penelitian hukum yang bersifat mendasar dan bertujuan untuk memperoleh keterangan, informasi dan data mengenai hal-hal yang belum diketahui. Penelitian ini seringkali menjadi semacam studi kelayakan *(feasibility study)*

2) Penelitian Hukum Deskriptif *(descriptive legal study)* Penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Pada penelitian hukum deskriptif peneliti, yang melakukannya harus menggunkan teori atau hipotesis.

3) Penelitian Hukum Eksplanatori *(explanatory legal study)* Penelitian hukum eksplanatori bersifat penjelasan dan bertujuan untuk menguji suatu teori atau hipotesis guna memperkuat atau menolak teori atau hipotesis hasil penelitian yang sudah ada.

Dalam penelitian ini tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum deskriptif, yaitu penelitian hukum yang bersifat memaparkan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu pada saat tertentu atau mengenai gejala yuridis yang ada atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat.[51] Penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisis mengenai pelaksanaan pemberian KUR Bank Rakyat Indonesia Cabang Kotabumi., isi dari perjanjian tersebut, dan keberlakuan bagi pihak-pihak yang terkait didalamnya yaitu pihak bank selaku kreditur dan nasabahnya selaku debitur.

---

[50] *Ibid*, hlm.49
[51] *Ibid*, hlm.50

3.3. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap yang telah ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian. Terdapat tiga jenis pendekatan masalah dalam penelitian hukum normatif-terapan, yaitu:[52]

1. *Non judicial Case Study*

   Pendekatan *Non judicial Case Study* merupakan pendekatan studi kasus hukum yang tanpa konflik sehingga tidak ada campur tangan dengan pengadilan.

2. *Judicial Case Study*

   Pendekatan *judicial case study* adalah pendekatan studi kasus hukum yang terjadi karena konflik sehingga akan melibatkan campur tangan dengan pengadilan untuk memberikan keputusan penyelesaian (yurisprudensi).

3. *Live Case Study*

   Pendekatan *Live Case Study* merupakan pendekatan pada suatu peristiwa hukum yang prosesnya masih berlangsung atau belum berakhir.

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-empiris dengan tipe **"***non judicial case study"* yaitu merupakan pendekatan studi kasus hukum tanpa konflik sehingga tidak ada campur tangan dengan pengadilan.[53] Studi kasus dalam penelitian ini dilakukan pada lokasi penelitian yaitu PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Kotabumi.

3.4. Data dan Sumber data

Data yang digunakan dalam rangka penyelesaian penelitian ini yaitu menggunakan data primer dan data sekunder.

3.4.1. Data Primer

Data Primer, yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan secara langsung dari sumber datanya melalui wawancara, jajak pendapat dari individu atau kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu obyek, kejadian atau hasil pengujian benda).[54] Dalam penelitian ini data diperoleh dari informan dan responden yaitu dengan melakukan tanya-jawab secara langsung. Informan dalam penelitian ini

---

[52] *Ibid*, hlm.112
[53] *Ibid*, hlm.139
[54] Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 30.

Pihak PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Kotabumi yaitu Woro Hastuti selaku *Account Officer* (Mantri), Bela listiantika dan andes selaku *Surveyor* BRI Cabang Kotabumi serta 4 orang responden debitur KUR yaitu Indra Rupawan, Usep, Eko Sugeng Saputro, dan Junaidi.

3.4.2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang umumnya telah dalam keadaan siap terbuat *(ready made)*. Adapun sumber data berupa data sekunder yang biasa digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari:

a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
c. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2007
d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 Tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR)
e. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR).
f. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR).
g. SK Direksi Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995.
h. KEP-20/D.I.M.EKON/11/2010 Tentang Standar Operasional Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR).

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder dalam penelitian ini memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk kemana peneliti akan mengarah. Yang dimaksud dengan bahan hukum sekunder adalah doktrin-doktrin yang ada di dalam buku, jurnal

hukum dan internet. Dalam penulisan ini menggunakan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian yang hendak diteliti.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier pada penelitian ini adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, antara lain; kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.

3.5. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

3.5.1. Studi Kepustakaan

Suatu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dokumen- dokumen, buku-buku, dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan pembahasan penelitian. Dalam hal ini penulis mengumpulkan data-data dengan mempelajari:

a. Dokumen-dokumen atau berkas-berkas lainnya yang diperoleh dari PT Bank Rakyat Indonesia.
b. Buku-buku serta bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan pokok-pokok bahasan penelitian.

3.5.2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara *(Interview)* yaitu proses tanya-jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Metode wawancara terbagi menjadi 2 macam yaitu tertutup dan terbuka, Wawancara tertutup adalah semua pertanyaan tertuju pada satu jawaban, yaitu ya atau tidak, setuju atau tidak dan sebagainya. Wawancara terbuka adalah wawancara yang arah pertanyaannya memberikan peluang kepada informan untuk beragumen dan tidak membatasi hanya menjawab ya atau tidak saja.[55] Metode wawancara yang digunakan pada penelitian ini adalah wawancara terbuka, hal ini berfungsi sebagai penggali data yang lebih objektif dari informan untuk mendapatkan informasi terkait dengan materi yang dibahas dalam penelitian ini, dan dilakukan kepada para informan (Pihak Bank) dan responden (Nasabah) yang telah ditentukan yaitu Ibu

[55] Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabete, 2005), hlm. 319.

Woro Hastuti selaku *Account Officer* (Mantri), Bela Listiantika dan Andes selaku *Surveyor* BRI Cabang Kotabumi serta 4 orang responden debitur KUR yaitu Indra Rupawan, Usep, Eko Sugeng Saputro, dan Junaidi.

3.6. Metode Pengolahan Data

Data yang sudah terkumpul kemudian diolah. Pengolahan data umumnya dilakukan dengan cara sebagai berikut: [56]

1) Pemeriksaan Data *(editing)*

Pemeriksaan data adalah memeriksa kembali apakah data yang diperoleh itu relevan dan sesuai dengan bahasan, selanjutnya apabila ada data yang salah satu datanya yang kurang lengkap maka akan dilakukan perbaikan.

2) Rekontruksi Data *(reconstructing)*

Menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.

3) Sistematisasi Data *(systematizing)*

Merupakan kegiatan menghimpun data secara sistematis data yang sudah diedit dan diperbaiki diberi tanda menurut klasifikasi data dan urutan masalah.

3.7. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, analisis kualitatif menurut Abdul kadir Muhammad adalah penguraian data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.[57] Dalam penelitian ini data akan diuraikan ke dalam bentuk-bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis dan logis, sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang hendak dikaji yaitu Perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) antara Debitur dengan BRI Cabang Kotabumi membahas tentang isi perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR), Pelaksanaaan dari Perjanjian program Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Kotabumi dan hambatan atau tantangan yang perlu diatasi.

---

[56] Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm.51.
[57] Abdulkadir Muhammad, *op. cit,* hlm. 128.

V. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Pada pelaksanaannya, yang menjadi permasalahan adalah ketika Debitur tidak mengembalikan apa yang menjadi kewajibannya dan bank tidak menerima haknya yaitu atas pengembalian pinjaman tersebut. Hak dan kewajiban yang termuat dalam Surat Pengakuan Hutang sebagian besar telah dilaksanakan dengan baik kecuali kewajiban nasabah untuk menggunakan kredit sesuai dengan ketentuan KUR. Seperti yang tertuang pada Surat Pengakuan Hutang Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan bahwa "Kredit yang diterima oleh yang berhutang dari bank dipergunakan untuk keperluan investasi". Dan kewajiban lain yang belum terlaksana yaitu debitur harus melunasi seluruh pokok pinjaman beserta bunga, denda, dan biaya lainnya sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
2. Pelaksanaan hak dan kewajiban nasabah KUR BRI Cabang Kotabumi tidak seluruhnya terlaksana dikarenakan terdapat sejumlah hambatan yaitu dana yang didapatkan nasabah dari KUR yang seharusnya untuk keperluan investasi/modal usaha telah disalahgunakan untuk keperluan konsumtif. Dan hambatan lainnya yaitu ketidakstabilan finansial yang seringkali dialami oleh nasabah akibat fluktuasi pasar, perubahan regulasi, dan kenaikan biaya produksi menyebabkan penurunan pendapatan dan kesulitan dalam mengelola arus kas, yang pada gilirannya menghambat kemampuan mereka untuk melunasi pinjaman dengan tepat waktu ataupun gagal bayar(wanprestasi). Untuk menyelesaikan sengketa, BRI mengikuti Surat Pengakuan Hutang yang mencakup penagihan segera, penjualan agunan, dan penanganan kredit macet. Bank juga menawarkan negosiasi dan restrukturisasi pinjaman sebagai solusi

awal. Jika negosiasi gagal, tindakan hukum akan diambil. BRI berupaya membantu nasabah menjual agunan untuk menghindari lelang. Publikasi nama nasabah wanprestasi dilakukan untuk menekan nasabah agar melunasi hutang. Dengan mengedepankan itikad baik, BRI berusaha menjaga hubungan baik dengan nasabah dan meminimalkan kerugian dari kredit macet.

5.2. Saran

Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Kotabumi sebaiknya melakukan pendekatan personal dalam menangani nasabah yang kesulitan membayar, termasuk melalui diskusi untuk mencari solusi bersama, dapat meningkatkan hubungan dan kepercayaan. Selain itu transparansi tentang konsekuensi wanprestasi, termasuk publikasi nama di media, harus dijelaskan dengan jelas kepada nasabah. Implementasi langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan keberhasilan pelaksanaan KUR dan mendukung pertumbuhan usaha nasabah di BRI Cabang Kotabumi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

A. Abdurrachman, 2007. *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan*, Jakarta: Pradya Paramita.

Ahmadi Miru dan Sakka Pati, 2011. *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW*), Jakarta: Raja grafindo Persada.

Arikunto, Suharsimi, 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.

Badrulzaman, D Mariam dkk, 2001. *Perjanjian Kredit Bank*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti

Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2009. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara.

Fuady, Munir. 2013. *Hukum Jaminan Utang*, Jakarta: Erlangga.

Hermansyah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencan Prenada Media Group.

Hermansyah, 2006, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia (edisi revisi)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Ibrahim, Johnny. 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media Publishing.

Kasmir, 2015. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

M. Bahsan,2012. *Hukum Jaminan (Jamian Kredit Perbankan Indonesia)*, Jakarta: : Rajawali.

Muhammad, Abdulkadir, 2004. *Hukum dan Perjanjian hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti)

Mulyadi, Kartini dan Gunawan Widjaja dkk, 2014. *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Jakarta:Rajawali.

Projodikiro, Wiryono. 2000. *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bandung: Mandar Maju.

Rachmadi Usman, 2002. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Islam*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Subekti ,R . 2005. *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermassa.

Subekti R. dan Tjitrosudibio, 2001, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata Cetakan ke-31*, (Jakarta: PT Pradnya Paramitha). hlm. 339

Suyatno, Thomas, 2003. *Kelembagaan Perbankan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Waluyo, Bambang, 2008. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika).

Wiwoho, Jamal. 2011. *Hukum Perbankan Indonesia*, Surakarta: UNS Press.

B. Peraturan Perundang-Undangan.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt)

Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 Tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan KUR, ditetapkan pada 25 januari 2023.

C. Jurnal dan makalah:

Wahyuni, Niniek. 2017. *Penerapan Prinsip 5C dalam Pemberian Kredit Sebagai Perlindungan Bank*, e-Journal Unitomo, Volume 1 No. 1.

Benny Apriyanto, Yohanes. "Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Bank Dki Jakarta Cabang Solo Melalui Jalur Non, Litigasi",(Yogyakarta: Jurnal Hukum Ekonomi dan Bisnis, Universitas Atma Jaya). 2015. hlm. 6.

D. Website :

Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Perekonomian Indonesia, diakses melalui Nuansa.nusaputra.ac.id, pada tanggal 22 Agustus 2023 Pukul 19.05 WIB

Aprilia Hariani, *Bri Kontributor Terbesar Deviden Terbesar 2022*, diakses melalui https://www.pajak.com/ekonomi/bri pada tanggal 15 September 2023 pukul 20.00 WIB

Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007. Diakses Melalui https//peraturan.bpk.go.id, pada tanggal 23 Agustus 2023 Pukul 20.05 WIB

Prosedur Penyaluran Kredit Usaha Rakyat. Diakses melalui https://jdih.bpk.go.id, pada tanggal 23 Agustus 2023 Pukul 20.10 WIB

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, *Maksud dan Tujuan KUR*,https://Kur.ekon.go.id, diakses pada tanggal 23 Agustus 2023 Pukul 21.20 WIB

Azarine Yus, 2016, *Syarat Cara Mengajukan KUR*, https://www.bank-bri-bcamandiri.info/2016/01/syarat-cara-mengajukan-kur-bri-terbaru.html,diakses pada tanggal 15 agustus 2023 Pukul 14:00 WIB

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia,2016, *Landasan Hukum*, http://kur.e kon.go.id/landasan-hukum diakses pada tanggal 16 agustus 2023 Pukul 14.25 WIB